

## **PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN PENGANGGURAN DI KOTA MAKASSAR**

**FIRNAWATI<sup>1</sup>, MUHAMMADIAH<sup>2</sup>, ANSYARI MONE<sup>3</sup>**

- 1) Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fisipol Unismuh Makassar
- 2) Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fisipol Unismuh Makassar
- 3) Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fisipol Unismuh Makassar

### **ABSTRACT**

*Government of Makassar labor agency held job fair event to arrange a meeting between job seekers and users of labor in order to reduce the unemployment rate in the city of Makassar. The research methods applied was qualitative method with descriptive qualitative design. This research aimed to find out how the government's role in reducing unemployment in Makassar and to determine supporting and inhibiting factors of government's role. The results of this study indicated that the governments role in reducing unemployment in Makassar had been executed and every year the number of unemployed in the city of makassar had decreased.*

**Keywords:** *The role of government, reducing unemployment*

### **ABSTRAK**

Pemerintah Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar mengadakan kegiatan job fair untuk mempertemukan antara pencari kerja dengan pengguna tenaga kerja guna menekan angka pengangguran di Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dan tipe penelitian adalah deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam penanggulangan pengangguran di Kota Makassar dan untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat peran pemerintah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam penanggulangan pengangguran di Kota Makassar sudah dijalankan dan setiap tahun jumlah pengangguran di Kota Makassar sudah mulai berkurang.

**Kata kunci:** peran pemerintah, penanggulangan pengangguran

## PENDAHULUAN

Pengangguran merupakan penyakit yang dimiliki oleh setiap negara, bahkan negara yang telah maju sekalipun. Layaknya tubuh manusia apabila terkena penyakit maka tidak akan maksimal dalam menjalankan aktivitas. Demikian pula dengan suatu negara, karena negara merupakan suatu sistem dimana semua komponennya saling terhubung satu sama lain. Salah satu komponen tersebut adalah Sumber Daya Manusia (SDM).

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) penduduk usia kerja didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 15 tahun ke atas dimana terdiri dari Angkatan Kerja dan bukan Angkatan Kerja. Pertumbuhan penduduk tiap tahun akan berpengaruh terhadap pertumbuhan angkatan kerja. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar, memperkirakan pada tahun 2013 akan tercipta sebanyak 2,5 juta kesempatan kerja. Hal tersebut dapat mengurangi angka pengangguran di Indonesia, tetapi juga harus didukung oleh stake holder ketenagakerjaan di pusat dan daerah serta kerjasama

lintas sektoral. Sedangkan untuk angka pengangguran di Indonesia mengalami penurunan, yaitu dilihat dari Agustus 2012 sebesar 6,14% dibandingkan dengan Agustus 2011 sebesar 6,32 %. Akan tetapi, penurunan persentase ini masih jauh apabila dibandingkan negara lain yang memiliki kepadatan penduduk seperti halnya negara Republik Rakyat Cina. Oleh karena itu, kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan.

Salah satu masalah pokok yang dihadapi bangsa dan Negara Indonesia adalah masalah pengangguran. Pengangguran yang tinggi berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kemiskinan, kriminalitas dan masalah-masalah sosial politik yang juga semakin meningkat. Dengan jumlah angkatan kerja yang cukup besar, arus migrasi yang terus mengalir, serta dampak krisis ekonomi yang berkepanjangan sampai saat ini, membuat permasalahan tenaga kerja menjadi sangat besar dan kompleks.

Memang masalah pengangguran telah menjadi sosok yang

begitu menakutkan khususnya di negara-negara berkembang seperti di Indonesia. Negara berkembang seringkali dihadapkan dengan besarnya angka pengangguran karena sempitnya lapangan pekerjaan dan besarnya jumlah penduduk. Sempitnya lapangan pekerjaan dikarenakan faktor kelangkaan modal untuk berinvestasi, Hal ini akibat dari krisis finansial yang memporandakan perekonomian nasional, banyak para pengusaha yang bangkrut karena dililit hutang bank atau hutang ke rekan bisnis.

Kota Makassar mencatat jumlah penduduk (jumlah pengangguran) sebagai berikut : Pada tahun 2011 tercatat sebanyak 1,352.136. juta dan pada tahun 2012 tercatat sebanyak 1,369.609 juta, pada tahun 2013 tercatat sebanyak 1.369.609 juta dan pada tahun 2014 1.055.203 juta Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar mencatat sebanyak 908.202 orang warga Makassar terdaftar sebagai pencari kerja.

Data ini merupakan data akhir tahun 2011. Mereka terdaftar sebagai pencari kerja di kantor pemerintah dan perusahaan swasta.

Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar Jumlah ini lebih dari separuh jumlah warga Makassar sebanyak 1,6 juta, kemudian pada tahun 2012 mengalami pengurangan dengan jumlah tenaga kerja di Makassar sebanyak 540 ribu.

Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Makassar menggandeng HILSI (Himpunan Lembaga Latihan Seluruh Indonesia) untuk memberikan pelatihan kepada para pengangguran demi mengurangi angka pengangguran salah satu upaya yang kita tempuh demi mengurangi angka pengangguran itu adalah dengan menggandeng lembaga pelatihan seperti HILSI yang diharapkan dapat memberikan kontribusi besar bagi pemerintah," kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar, pihaknya terus berupaya mencari jalan bagi ratusan warga Kota Makassar yang hingga hari ini masih berstatus sebagai penganggur.

Salah satu yang dilakukannya dengan lembaga pelatihan kemampuan agar mereka segera menemukan lapangan pekerjaan yang cocok dengan spesifikasi dan keilmuan yang dimilikinya. HILSI (Himpunan Lem-

baga Latihan Seluruh Indonesia) merupakan sebuah organisasi yang paling banyak membantu pemerintah dalam membuka lapangan pekerjaan, termasuk di Makassar. Ini sangat kami apresiasi dan kami harap ratusan tenaga kerja kita yang saat ini masih menganggur bisa terserap semuanya.

Menurut beberapa sarjana muda mencari pekerjaan di Kota - Makassar sangatlah susah dan selain itu beberapa juru parkir liar setelah saya temui di toko-toko besar di Makassar adalah mereka sudah pasrah mencari pekerjaan tetapi sampai sekarang belum dapat juga jadi terpaksa mereka memilih pekerjaan yang seperti ini. Selain itu keberadaan Pantai Losari yang setiap harinya menarik pengunjung untuk berkunjung kesana membuat para pemuda yang tidak punya pekerjaan, menjadi malas untuk mencari kerja dan memilih mengamen dan menjadi juru parkir di tempat tersebut, hal tersebut membuat masyarakat menjadi terganggu dan kasihan kepada mereka maka dari petisi ini saya berharap semoga para pengangguran yang mendapatkan pekerjaan yang

layak tanpa membuat orang lain merasa dirugikan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat sangat dibutuhkan karena dengan hal tersebutlah cerminan kota aman tentram dan damai.

Ardianto, Alif, 2011. Pemberdayaan Peran Pemerintah Daerah sebagai Regulator, Fasilitator dan Katalisator dalam Usaha Pemulihan Sektor Usaha Kecil dan Menengah di Wilayah Erupsi Merapi 2010

Menurut Soeharto, (2011: 7) peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu perannya.

Sukirno (2004: 28) bahwa pengangguran adalah jumlah tenaga kerja dalam perekonomian yang secara aktif mencari pekerjaan tetapi belum memperolehnya. Pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya

disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya, Berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial politik yang juga semakin meningkat. Dengan jumlah angkatan kerja yang cukup besar, arus migrasi yang terus mengalir, serta dampak krisis ekonomi yang berkepanjangan sampai saat ini, membuat permasalahan tenaga kerja menjadi sangat besar dan kompleks.

Menurut Sugiyono (2009 : 366), teknik pengumpulan data tragulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data yang telah ada.

Dalam perkembangannya organisasi departemen Naker Transkop mengalami perubahan dengan dipindahkan urusan koperasi ke Departemen perdagangan. Kemudian disempurnakan kembali setelah masalah urusan transmigrasi dilimpahkan ke departemen Transmigrasi. Penyempurnaan organisasi semula menganut pendekatan "Holding

Company Type" beralih kependekatan "Integrated Type" struktur organisasi yang baru diatur dalam keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep-525/Men/1984 yang mengacu pada kaprecs tahun 1997 dan masa Kabinet Pembangunan VI.

Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Makassar menggandeng HILSI (Himpunan Lembaga Latihan Seluruh Indonesia) untuk memberikan pelatihan kepada para pengangguran demi mengurangi angka pengangguran. "Salah satu upaya yang kita tempuh demi mengurangi angka pengangguran itu adalah dengan menggandeng lembaga pelatihan seperti HILSI yang diharapkan dapat memberikan kontribusi besar bagi pemerintah,"

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar, mengatakan, pihaknya berupaya mencarikan jalan bagi ratusan warga Kota Makassar yang hingga hari ini masih berstatus sebagai penganggur.

Salah satu yang dilakukannya dengan menggandeng lembaga pelatihan kemampuan agar mereka segera menemukan lapangan peker-

jaan yang cocok dengan spesifikasi dan keilmuan yang dimilikinya.

HILSI (Himpunan Lembaga Latihan Seluruh Indonesia) merupakan sebuah organisasi yang paling banyak membantu pemerintah dalam membuka lapangan pekerjaan, termasuk di Makassar. Ini sangat kami apresiasi dan kami harap ratusan tenaga kerja kita yang saat ini masih menganggur bisa terserap semuanya.

Pemerintah saat ini membutuhkan bantuan dari semua pihak untuk menekan angka pengangguran di Makassar karena jika angka pengangguran semakin bertambah, akan mempengaruhi sistem perekonomian dan sosial. Ia berharap, dengan dilantiknya kepengurusan baru, peranan HILSI sebagai mitra pemerintah dalam menciptakan tenaga terampil dan membuka lapangan pekerjaan semakin lebih baik.

Menurut beberapa sarjana muda, mencari pekerjaan di Kota Makassar sangatlah susah dan selain itu beberapa juru parkir liar setelah saya temui di toko-toko besar di Makassar adalah mereka sudah pasrah mencari pekerjaan tetapi sampai sekarang belum dapat juga

jadi terpaksa mereka memilih pekerjaan yang seperti ini. Selain itu keberadaan Pantai Losari yang setiap harinya menarik pengunjung untuk berkunjung kesana membuat para pemuda yang tidak punya pekerjaan, menjadi malas untuk mencari kerja dan memilih mengamen dan menjadi juru parkir di tempat tersebut, hal tersebut membuat masyarakat menjadi terganggu dan kasihan kepada mereka maka dari petisi ini saya berharap semoga para pengangguran yang mendapatkan pekerjaan yang layak tanpa membuat orang lain merasa dirugikan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat sangat dibutuhkan karena dengan hal tersebutlah cerminan kota aman tentram dan damai.

#### **METODE PENELITIAN**

Waktu penelitian yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2015 sampai 30 September 2015. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Makassar yaitu di Kantor Disnaker (Dinas Tenaga Kerja) Kota Makassar, Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui Peran

Pemerintah Dalam Penanggulangan Pengangguran di Kota Makassar.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan sesuai dengan keadaan mengenai Peran Pemerintah Daerah Kota Makassar Dalam Penanggulangan Pengangguran di Kota Makassar.

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan fenomena- fenomena yang terjadi pada objek penelitian selama penelitian berlangsung.

Teknik pengumpulan data yang akan di gunakan antara lain: 1).Observasi merupakan penelitian yang dilaksanakan dengan melakukan pengamatan secara langsung pada badan (lembaga)tersebut; 2).Wawancara (*Interview*) Wawancara yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh sejumlah data yang diperlukan dengan cara mewawancarai pihak-pihak yang berkompeten dalam badan (lembaga) tersebut maupun pihak-pihak terkait lainnya;3) Dokumentasi merupakan suatu informasi tertulis,

visual atau fakta yang bisa dinyatakan dalam bentuk dokumen-dokumen dan buku.

Menurut Sugiyono (2009 : 368) ada 3 macam triangulasi yaitu :

- a. Triangulasi Sumber, Triangulasi sumber berarti membandingkan dengan cara mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan antara apa yang dikatakan secara umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi dan membandingkan hasil wawancara dengan dekumentasi yang ada;
- b. Triangulasi Teknik, Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu di cek dengan observasi dan dekumentasi;
- c. Triangulasi Waktu juga sering mempengaruhi kreabilitas data.

Data yang dikumpulkan dengan taknik wawancara. Dalam rangka pengujian kreabilitas data dapat

dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga ditemukan kapastian datanya.

Data yang dikumpulkan oleh peneliti diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam bentuk reduksi data, sajian data serta penarikan kesimpulan dengan menggunakan proses siklus serta pengambilan kesimpulan akhir dengan menggunakan penalaran sistematis kemudian penulis menginterpretasikan menjadi seperangkat informasi.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Untuk mengatasi pengangguran, pemerintah menenpuh cara-cara berikut: 1) Meningkatkan mobilitas modal dan tenaga kerja; 2) Mengadakan pelatihan kerja yang sesuai dengan formasi kerja yang tersedia; 3) Mendirikan industri padat karya yang melibatkan banyak tenaga kerja; 4) Menyukseskan pembangunan proyek proyek umum yang

dilakukan oleh Pemerintah; 5) Meningkatkan daya beli masyarakat;

Pemerintah mempunyai peran penting dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah ketenagakerjaan, diantaranya adalah : Menyusun dan memonitor pelaksanaan peraturan ketenaga kerjaan Pemerintah melalui Dapertemen Tenaga dan lembaga-lembaga terkait lainnya mengeluarkan undang-undang, keputusan, dan regulasi-regulasi lainnya untuk mengatur ketenagakerjaan di Indonesia, Meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja.

Untuk meningkatkan kualitas dari produktifitas tenaga kerja, pemerintah memberikan program-program pendidikan dan pelatihan seperti sebagai berikut: a) Mendirikan dan mengembangkan sekolah-sekolah kejuruan yang mendukung dunia kerja; b) Menyelenggarakan pelatihan untuk pencari kerja;c) Menyelenggarakan pelatihan manajemen didaerah; d) Menyelenggarakan pelatihan pemagangan; e) Meningkatkan prasarana pelatihan untuk pencari kerja dan pegawai



pengawas ketenagakerjaan. Memperluas dan mengembangkan kesempatan kerja di dalam negeri. Untuk mencapai tujuan pemerintah menyelenggarakan program transmigrasi, dan program-program seperti berikut ini:

a). Mendorong dan memfasilitasi penciptaan wira usaha baru; b). Meningkatkan kerja sama dengan lembaga-lembaga Nasional dan Internasional; c). Melaksanakan pelatihan ketrampilan seperti pelatihan magang, teknisi pelatihan untuk angkatan kerja khusus seperti penyandang cacat dan lanjut usia.

1). Memperluas dan mengembangkan kesempatan kerja luar negeri. Penyaluran Tenaga Kerja Indonesia (TKI) keluar negeri merupakan salah satu cara menekan pengangguran, sekaligus menjadi salah satu sumber perolehan Devisa negara.

Berbagai langkah dilakukan untuk menunjang program pengiriman TKI adalah sebagai berikut :

a). Menyiapkan dan mensosialisasikan peraturan perundangan yang terkait dengan program pengiriman

TKI; b). Menegakkan peraturan dan memberikan sanksi bagi para pihak melanggar peraturan; c). Meningkatkan pelayanan dan perlindungan terhadap para TKI; 2). Perlindungan tenaga kerja Program yang dilaksanakan pemerintah untuk melindungi tenaga kerja adalah sebagai berikut: a). Mensosialisasikan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di seluruh Indonesia; b). Mensosialisasikan standar pengupahan; 3). Membina hubungan industri dalam negeri dan Internasional, beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk membina hubungan industrial adalah sebagai berikut:

a). Menyempurnakan Undang-Undang dan petunjuk ketenagakerjaan dan mensosialisasikan kepada pelaku industri; b). Mengembangkan serikat pekerja dan pengusaha; c) Membantu penyelesaian perselisihan antara buruh dan pihak manajemen.

4). Memonitor pelaksanaan ketenagakerjaan, Langkah-langkah yang diambil pemerintah adalah :

a). Menyelenggarakan pelatihan pegawai pengawas ketenagakerjaan; memper-

luas dan mengembangkan kesempatan kerja dalam negeri. Untuk mencapai tujuan pemerintah menyelenggarakan program-program seperti berikut ini :

a. Mendorong dan memfasilitasi penciptaan wira usaha baru; b). Meningkatkan kerja sama dengan lembaga-lembaga nasional dan internasional; c. Melaksanakan pelatihan keterampilan seperti pelatihan memegang teknis pelatihan untuk angkatan kerja khusus seperti penyandang cacat dan lanjut usia.

1). Memperluas dan mengembangkan kesempatan kerja luar negeri. Penyaluran Tenaga Kerja Indonesia (TKI) keluar negeri merupakan salah satu cara menekan pengangguran sekaligus menjadi salah satu sumber perolehan devisa negara.

Berbagai langkah dilakukan untuk menunjang program pengiriman TKI adalah sebagai berikut : a). Menyiapkan dan mensosialisasikan peraturan per-undangan yang terkait dengan program pengirim TKI; b). Mene-gakkan peraturan dan memberikan

sanksi bagi para pihak melanggar peraturan; c). Meningkatkan pelayanan dan perlindungan terhadap para TPI; 2). Perlindungan tenaga kerja program yang dilaksanakan pemerintah untuk melindungi tenaga kerja adalah sebagai berikut : a). Men-sosialisasikan standar pengupahan; 3). Membina hubungan industri dalam negeri dan internasional, beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk membina hubungan industrial adalah sebagai berikut : a. Menyempurnakan undang- undang dan petunjuk ketenagaker-jaan dan mensosialisasikan kepada pelaku industri; b. Mengembangkan serikat pekerja dan pengusaha; c. Membantu penyelesaian perselisihan antara buruh dan pihak manajemen. 4).Memonitor pelaksanaan ketenaga-kerjaan langkah-langkah yang diambil pemerintah adalah sebagai berikut: a). Menyelenggarakan pelatihan pegawai pengawas ketenaga-kerjaan; b). Indonesia melakukan pertemuan dengan berbagai pihak untuk mendeteksi pelanggaran kete-nagakerjaan; 5). Menyusun dan me-laksanakan program- program yang mendukung tercapainya sistem kete-

nagakerjaan yang ideal; a). Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur negara; b). Meningkatkan kualitas pelayanan publik; c). Meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam usaha dan masyarakat.

Salah satu upaya yang ditempuh oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal (Ditjen PNFI) Departemen Pendidikan Nasional khususnya Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan untuk memberikan kontribusi bagi penurunan angka pengangguran adalah dengan meluncurkan bantuan subsidi penyelenggaraan program-program kursus berbasis pendidikan kecakapan hidup (PKH) yang terdiri atas KWD, KWK, KPP, dan PKH kerjasama SMK/Poltek. KWD merupakan singkatan dari Kursus Wirausaha Orientasi Pedesaan.

Kursus Wirausaha Orientasi Pedesaan (KWD) adalah program kursus yang diselenggarakan secara khusus, untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat kurang mampu agar memperoleh pengetahuan, keterampilan dan menumbuhkan sikap mental kreatif,

inovatif, bertanggung jawab serta berani menanggung resiko (sikap mental profesional) dalam mengelola potensi diri dan lingkungannya yang dapat dijadikan bekal untuk peningkatan kualitas hidupnya.

Melihat dari pengertiannya, program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap warga masyarakat pedesaan sebagai bekal untuk dapat bekerja atau usaha mandiri sesuai dengan potensi / sumber daya lokal di daerahnya, memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat pedesaan agar memiliki kompetensi yang diperlukan dalam dunia usaha atau dunia kerja sesuai dengan jenis kursus yang diikuti, sehingga mampu merebut peluang kerja pada perusahaan / industri dengan penghasilan yang wajar atau mampu menciptakan lapangan kerja sendiri. Sasaran dari program KWD adalah warga masyarakat kurang mampu berusia 18 s/d 35 tahun yang tidak sedang sekolah dan tidak memiliki pekerjaan tetap yang layak dan tentunya yang belum pernah mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Bidang usaha dalam program

KWD adalah bidang- bidang usaha yang lazim ada di daerah pedesaan seperti pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan dan bidang-bidang lain yang biasa ada di desa. KWK merupakan singkatan dari Kursus Wirausaha Orientasi Perkotaan.

Kursus wirausaha orientasi perkotaan (KWK) adalah program kursus berbasis kecakapan hidup yang diselenggarakan untuk memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat kurang mampu agar memperoleh pengetahuan, keterampilan dan menumbuh-kembangkan sikap mental kreatif, inovatif, bertanggung jawab dan berani menanggung resiko (sikap mental profesional) dalam mengelola potensi diri dan lingkungannya yang dapat dijadikan bekal untuk peningkatan kualitas hidupnya.

Tujuan dari program KWK adalah a. Untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap warga masyarakat sebagai bekal untuk dapat bekerja dan/atau usaha mandiri sesuai dengan potensi/ sumber daya serta peluang kerja yang ada di lingkungannya; dan

b. Memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat agar memiliki kompetensi yang diperlukan dalam dunia usaha atau dunia kerja sesuai dengan jenis kursus yang diikuti, sehingga mampu merebut peluang kerja pada perusahaan / industri dengan penghasilan yang wajar atau sepanjang memungkinkan mampu memulai menciptakan lapangan kerja sendiri.

Sasaran dari program KWK adalah warga masyarakat dengan kriteria yang sama dengan sasaran program KWD. Yang membedakan KWD dari KWK adalah jenis bidang usahanya. Bidang- bidang usaha KWK terdiri atas menjahit, TKK (Tata Kecantikan Kulit), TKR (Tata Kecantikan Rambut), TRP (Tata Rias Pengantin), otomotif, jasa boga, elektroika, spa, perhotelan, komputer, dan keterampilan jasa lainnya yang laku di pasar perkotaan. KPP singkatan dari (Kursus Para Profesi) adalah salah satu program pendidikan non formal yang berupa program pelayanan pendidikan dan pelatihan berorientasi pada PKH (Pendidikan Kecakapan Hidup) yang diberikan kepada masyarakat yang

memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, serta sikap dan kepribadian yang mengarah pada penguasaan kompetensi di bidang keterampilan tertentu setingkat operator atau teknisi yang bersertifikat kompetensi sebagai bekal untuk bekerja.

Tujuan dari program KPP adalah untuk memberikan kesempatan bagi para peserta didik usia produktif untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap mental sesuai dengan kebutuhan/ peluang pasar kerja yang tersertifikasi serta fasilitasi penempatan kerja pada dunia usaha/industri dalam negeri dan luar negeri.

Karakteristik sasaran program KPP sama dengan sasaran program KWD maupun KWK. Bedanya, KWD dan KWK diarahkan untuk bekerja pada perusahaan (orang lain) atau bekerja/ berusaha mandiri, sedangkan KPP diarahkan untuk bekerja sesuai dengan permintaan pasar (bursa) kerja. Prioritas Jenis keterampilan yang dapat diselenggarakan melalui program KPP, antara lain: Otomotif, Elektronika, Spa, Komputer,

Akupunktur, PLRT plus, menjahit, Baby Sitter, Care Giver, House Keeping, Pariwisata (Perhotelan), dan jenis keterampilan lainnya sesuai job order.

Kebijakan dari Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan menyatakan bahwa penyelenggaraan program-program kursus tersebut menggunakan pendekatan “four in one” atau “4 in 1”, yakni, 1. Melalui analisis kebutuhan pelatihan (training need assessment job order); 2. Pelatihan berbasis kompetensi (competency based training/ CBT); 3. Sertifikasi; dan 4. Jaminan penempatan kerja (job placement) atau pembinaan usaha mandiri.

Analisis kebutuhan pelatihan diperlukan untuk memastikan bahwa program yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pelatihan berbasis kompetensi dimaksudkan agar pelaksanaan pelatihan bisa efisien dan efektif serta benar-benar memberikan bekal keterampilan yang memadai bagi peserta didik untuk memenangkan pasar (bursa) kerja atau berusaha mandiri. Sertifikasi diperlukan untuk menjamin kualitas lulusan program

agar ketika memasuki dunia kerja dan dunia wirausaha benar- benar siap.

Jaminan penempatan kerja diberikan untuk memberi kepastian kepada peserta program (peserta didik) bahwa program yang mereka ikuti benar- benar memenuhi harapan mereka. Monitoring dan evaluasi memang dilaksanakan tetapi secara parsial dan terbatas pada penyelenggaraan programnya saja.

Untuk itu, perlu ada kajian yang lebih mendalam dan menyeluruh mengenai seluruh rangkaian penyelenggaraan program-program kursus tersebut sehingga dapat diketahui hasil dan dampak penyelenggaraan programnya untuk dapat mengetahui keefektifan dan efisiensi penyelenggaraan program.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Pemerintah Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar Dalam Menanggulangi Pengangguran di Kota Makassar maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Adapun kegiatan yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar yaitu: 1) Melaksanakan

Bursa Tenaga Kerja guna mengurangi angka pengangguran di Kota Makassar. Kegiatan yang diadakan seperti job fair bertujuan untuk memfasilitasi, mempertemukan antara pengguna kerja dan pencari kerja dalam suatu tempat yang diharapkan akan terjadi suatu proses penempatan kerja, guna menekan angka pengangguran; 2) Pelatihan/ Magang guna meningkatkan kualitas tenaga kerja Seperti pelatihan kewirausahaan pelatihan ini dilaksanakan agar tenaga kerja siap memasuki dunia kerja, jika mereka mempunyai bakat yang bagus maka mereka diangkat menjadi tenaga kerja di perusahaan, tujuan diadakannya pelatihan ini guna memberdayakan angka pengangguran; 3) Perluasan Kesempatan Kerja, Pemerintah Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar membuat kebijakan dalam rangka penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja telah mengeluarkan kebijakan baik di bidang Produksi, Investasi, Teknologi, Ekspor, Impor, dan kebijakan sektoral yang menekan pada penciptaan dan perluasan lapangan kerja ini sebagai salah satu

solusi untuk mengatasi masalah keterbatasan lapangan kerja.

Berdasarkan kesimpulan di atas maka perlu dikemukakan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1) Pemerintah harus lebih memperhatikan nasib para masyarakat yang belum mendapat pekerjaan / pengangguran. 2) Adanya lapangan kerja baru guna menanggulangi angka pengangguran di kota makassar tersebut. 3) Diperlukan kerja sama pemerintah dan berbagai instansi/ perusahaan agar pengangguran di Kota Makassar dapat tertanggulangi.

#### DAFTAR PUSTAKA

Ardianto, Alif, 2011. *Pemberdayaan Peran Pemerintah Daerah Sebagai Regulator, Fasilitator Dan Katalisator Dalam Usaha Pemulihan Sektor Usaha Kecil Dan Menengah*. Makassar : Erupsi Merapi

Juriati, 2013. *Pemberdayaan Apratur Pemerintah dalam kegiatan pelayanan publik pada bidang catatan sipil dan kependudukan Dinas tenaga kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan catatan sipil Kota Makassar: FISIP Universitas Muhammadiyah Makassar*

Jamasy, Owin. 2004. *Keadilan, Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan*. Blatinka Mizan

Sarman, Sajogjo. 2000. *Masalah Penanggulangan Kemiskinan. Kawasan Timur Indonesia* : Puspa Swara

Sugiyono. 2004. *Metode penelitian Administrasi. Edisi ke-14*. Bandung : Alfabeta.

KrishnamurtiB.2003. *Pengembangan Keuangandan Penanggulangan Kemiskinan*. Jurnal Ekonomi Rakyat, Artikel – Th. II – No. 2 – April 2003

Sumodiningrat, G. 1998. *Membangun Perekonomian Rakyat*. Yogyakarta : PustakaPelajar.

Ardianto, Alif, 2011. *Pemerdayaan Peran Pemerintah Daerah Sebagai Regulator, Fasilitator dan Katalisator, dalam Usaha Pemulihan Sektor Usaha kecil dan Menengah*, di Wilayah Erupsi Merapi 2010.

Melayu, Hasibuan, 2003. *Manajemen SDM*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.

Sugiyono, 2004. *Metode Penelitian Administrasi*. Edisi ke-14 : Alfabeta, Bandung.